

Mencari Format Baru Ujian Nasional

Baru saja saya membaca sebuah harian nasional yang memuat statemen Menteri Pendidikan Nasional, bahwa ke depan akan ada perubahan format ujian nasional. Menteri mengatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan undang-undang, maka ujian nasional masih perlu dan tetap akan dilaksanakan. Akan tetapi format ujian yang sudah ada itu akan ditinjau kembali. Format baru yang dimaksudkan itu seperti apa bentuknya, juga masih belum dijelaskan. Intinya dalam statemen itu, bahwa ujian nasional masih dianggap perlu untuk mengevaluasi secara nasional prestasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan pendidikan bangsa ini.

Saya menulis artikel ini tatkala sedang di Airport Sukarno Hatta, untuk memanfaatkan waktu ketika sedang menunggu penerbangan ke Moskow, menghadiri undangan konferensi tentang pendidikan teologi yang diselenggarakan oleh sebuah perguruan tinggi Islam di sana. Ide tulisan ini muncul setelah beberapa saat sebelumnya, saya melihat sekian banyak remaja perempuan yang juga sama-sama berada di airport, yang tampaknya mereka akan berangkat ke luar negeri menjadi TKW.

Melihat banyaknya calon TKW itu, dalam pikiran saya mengatakan bahwa, bukankah sebenarnya mereka itu adalah produk pendidikan bangsa selama ini. Saya melihat dari penampilannya, mereka itu pernah mengenyam pendidikan. Saya menduga, para calon TKW itu bukan saja lulusan sekolah dasar, tetapi mungkin juga lulusan SMP, SMA atau juka SMK. Bahkan tidak mustahil di antara mereka ada yang telah lulus perguruan tinggi. Jika bayangan saya ini benar, maka bukankah dari fenomena banyaknya TKW itu saja bisa diketahui, bahwa hasil pendidikan bangsa ini, -----setidak-tidaknya sebagian, hanya akan memasuki lapangan pekerjaan yang diterima secara terpaksa itu.

Akhir-akhir ini perbincangan tentang TKW terjadi di mana-mana, sebagai akibat banyaknya kasus penganiayaan sebagian mereka di luar negeri. Tidak saja mereka dianiaya, tetapi juga ternyata gaji sebagian mereka tidak dibayar. Cerita tentang penderitaan TKW di luar negeri sudah tidak kurang-kurang, tetapi mereka masih tidak mau membatalkan niatnya, tetap pergi. Banyaknya TKW ke luar negeri, oleh sementara orang dianggap menurunkan harkat bangsa. Tentu bagi TKW sendiri, dan orang yang mengerti akar masalahnya tidak akan mengatakan demikian. Bagi para TKW yang terpenting adalah mendapatkan pekerjaan dan rizki untuk menyambung hidup.

Pada zaman sekarang ini, sekedar berhasil mendapatkan pekerjaan, apapun sulitnya bukan main. Bagi orang yang tidak memiliki ketrampilan, pengalaman dan atau modal yang cukup, maka pekerjaan apa saja diterima, tidak terkecuali TKW, apapun resikonya. Keadaan seperti itu tidak saja dirasakan oleh anak-anak wanita dari daerah tertentu, melainkan sudah merata, hampir di semua daerah.

Terkait dengan banyaknya orang mencari pekerjaan, beberapa hari lalu, saya mendapatkan informasi bahwa hampir setiap hari, penerbangan ke dan dari Taiwan selalu dipenuhi oleh para TKW. Informasi itu secara tidak langsung memperteguh bahwa mencari pekerjaan di dalam negeri sudah sangat sulit, hingga banyak orang harus pergi ke luar negeri. Selain itu, fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa hasil pendidikan di negeri ini sebenarnya sebagian masih

perlu ditingkatkan lagi, atau katakanlah kualitasnya masih rendah, tanpa harus melihatnya melalui ujian nasional.

Rendahnya mutu hasil pendidikan itu sebenarnya dengan mudah dapat diketahui. Saya pernah mendapatkan pengalaman yang menyedihkan. Ketika itu, saya bersama beberapa rektor, berkunjung ke Universitas King Abdul Aziz, di Jeddah. Perguruan tinggi itu memiliki teaching hospital sebagai kelengkapan fakultas kedokterannya. Rumah sakit pendidikan tersebut, menurut penglihatan saya, ukurannya sangat besar, sehingga menampung ratusan perawat dan dokter. Umumnya para pegawai teaching hospital tersebut berasal dari India dan Philipina. Anehnya, tidak ada satupun di antara mereka itu yang berasal dari Indonesia.

Melihat kenyataan itu, dalam kesempatan berdialog, saya mencoba menanyakan, mengapa tidak ada di antara pegawainya, yang berasal dari Indonesia. Saya berargumentasi, bahwa tenaga kerja dari Indonesia lebih sesuai dengan masyarakat Saudi, karena memiliki kesamaan agama. Pertanyaan saya tersebut dijawab dengan pertanyaan yang menyakitkan, yaitu apakah tenaga kerja dari Indonesia mampu berbahasa Arab. Atas jawaban itu saya bertanya balik lagi, apakah tenaga kerja dari Pilipina juga bisa berbahasa Arab. Pertanyaan itu dijawab, bahwa orang philipina, sekalipun tidak berbahasa Arab, mereka bisa berbahasa Inggris. Selain itu, biasanya mereka mau belajar bahasa Arab.

Dialog sederhana di muka, lagi-lagi kiranya sudah bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap hasil pendidikan di tanah air ini. Jika yang dimaui oleh pemerintah adalah gambaran umum tentang hasil pendidikan, maka tanpa ujian nasional pun sebenarnya sudah bisa diketahui. Tanpa diberikan soal ujian Bahasa Inggris misalnya, sebenarnya sudah diketahui, bahwa kemampuan Bahasa Inggris siswa lulusan sekolah menengah, bahkan juga perguruan tinggi selama ini masih lemah. Mungkin di Indonesia baru beberapa sekolah saja yang berhasil membisakan bahasa asing bagi para siswanya. Pada umumnya masih gagal.

Apabila demikian itu halnya, maka sebenarnya yang diperlukan terhadap pendidikan bangsa ini adalah peningkatan kualitas. Sementara ini yang dilakukan hanyalah sebatas memperbaiki aspek yang kurang substantive dan hanya bersifat formal. Pemerintah membuat standar pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional, peningkatan kualitas guru dengan meningkatkan ijazah, tanpa diikuti oleh kualitas yang memadai dan sejenisnya. Memang, ijazah para guru berhasil ditingkatkan, tetapi belum tentu ilmunya bertambah, karena peningkatan ijazah tersebut juga hanya dilakukan secara formal, misalnya dengan dual mode, yang pelaksanaan program itu hanya menargetkan selesai, bukan peningkatan kualitas hasil pendidikan yang sebenarnya dibutuhkan.

Mengetahui hasil pendidikan yang masih rendah kualitasnya seperti itu, mestinya pemerintah perlu segera mengambil keputusan yang bersifat mendasar, radikal dan bahkan kalau perlu revolusioner. Misalnya untuk menyesuaikan dengan tuntutan global, maka harus ada gerakan bersama memperbaiki kemampuan berbahasa asing, -----Inggris dan Arab. Gerakan itu dijadikan tema dan atau jargon yang menjadi gerakan besar yang diikuti oleh seluruh lembaga pendidikan di negeri ini.

Melalui kebijakan tersebut maka ditargetkan bahwa lulusan jenjang pendidikan sekolah menengah misalnya, harus menguasai salah satu Bahasa Asing. Ujiannya tidak boleh dilakukan secara formal, tetapi harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Kalau perlu, misalnya kepala sekolah dan para gurunya pun ikut diuji. Jika kepala sekolah dan guru tidak lulus, maka muridnya juga dianggap tidak lulus. Kebijakan ini menjadikan lahirnya gerakan belajar bersama untuk meningkatkan kualitas.

Gambaran sederhana ini kiranya bisa diperdalam, dan dijadikan sebagai format baru ujian nasional. Bahwa dalam evaluasi itu yang diuji bukan saja muridnya, tetapi juga kepala sekolah dan para guru-gurunya. Tingkat kualitas kepala sekolah dan guru sebenarnya lebih tepat dijadikan tolok ukur kemajuan institusi pendidikan yang dipimpinnya. Sebab pada hakekatnya mereka itulah yang diharapkan akan melahirkan kualitas itu. Dengan demikian, maka akan tampak mana institusi pendidikan yang dikelola secara serius dan atau yang hanya berorientasi untuk memenuhi ketentuan formal, tetapi tidak menyentuh hakekat pendidikan yang sebenarnya. *Wallahu a'lam.*